# MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA LOKAL LAMPUNG
## (Analisis Eksploratif Mencari Basis Filosofis)

**Nirva Diana**

Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
*nirvadiana64@yahoo.co.id*

**Abstract**

*Education is a tool to raise the degree and quality of the nation. Good management is needed to keep educational process continuing. Conventional management is going to silence the world of education in responding to the challenges of time and modernity. In the meantime, Lampung community still has a strongly local culture and it has great potential to become a major principle for the implementation of an ideal education. Management education based on local culture is, by itself, a manifestation of democratic education and community based (community-based education). By using methods of descriptive and phenomenological approach, it is understood that the culture of Lampung-based management of education is a necessity for management reform in education, particularly among the Lampongs. In addition, it also has a normative as well as the philosophical foundation rooted in the values of local traditions, as well as the demands of an increasingly democratic era and in the country with a democratic system.*

**Abstrak**

Pendidikan adalah alat untuk mengangkat derajat dan kualitas bangsa. Manajemen yang baik dibutuhkan guna kelangsungan proses pendidikan. Manajemen yang masih konvensional akan membungkam dunia pendidikan dalam menjawab tantangan zaman dan modernitas. Sementara itu, masyarakat Lampung memiliki kebudayaan lokal yang masih kental, dan berpotensi besar sebagai asas utama bagi terselenggaranya pendidikan yang ideal. Manajemen pendidikan yang berbasis pada budaya lokal ini, dengan sendirinya, merupakan manifestasi dari pendidikan yang demokratis dan berbasis masyarakat (*community-based education*). Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan fenomenologis, dapat dipahami bahwa manajemen

pendidikan berbasis budaya Lampung ini adalah sebuah keniscayaan bagi reformasi manajemen dalam dunia pendidikan, khususnya di kalangan masyarakat Lampung. Selain itu, ia juga memiliki landasan normatif sekaligus filosofis yang berakar pada nilai-nilai tradisi lokal, serta sebagai tuntutan jaman yang semakin demoktratis dan di negara yang menganut sistem demokrasi.

**Kata Kunci:** Lampung, nilai budaya, kearifan lokal, manajemen pendidikan

## A. Pendahuhuan

Lampung adalah daerah dan kelompok etnik yang menggunakan bahasa Lampung. Secara adat, yang termasuk masyarakat Lampung tidak sebatas yang berada di Propinsi Lampung, tetapi juga masyarakat di daerah Danau Ranau, Muaradua, Komering, hingga Kayu Agung, Propinsi Sumatera Selatan.[1]

Suku asli Lampung terbagi atas dua sistem adat dan dialek, yaitu Pepadun berdialek O dan Paminggir (Saibatin) berdialek A. Suku-suku bersistem Pepadun adalah Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulangbawang, dan Pubian. Kelima kesatuan adat ini mendiami kawasan pedalaman Lampung. Sedangkan suku-suku bersistem Paminggir adalah Paminggir Belalu/Ranau, Paminggir Krui, Pesisir Semangka, Pesisir Teluk, Pesisir Rajabasa, dan Pesisir Melinting-Meringgai. Keenam kesatuan adat mendiami daerah pesisir bagian barat, selatan, dan timur Lampung. Termasuk dalam kategori terakhir adalah suku Komering dan Kayu-Agung yang kini termasuk Propinsi Sumatera Selatan.[2]

Masyarakat Lampung terdiri dari berbagai etnis yang mencerminkan tipologi masyarakat multikultural. Kebudayaan lokal pun merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Masyarakat Lampung dan budaya lokal bersenyawa dalam satu-kesatuan yang padu. Kebudayaan menjadi "detak nadi" kehidupan masyarakatnya. Oleh

[1]Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung* (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 159.

[2]Hilman Hadikusuma dkk, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, cet. ke-2 (Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Lampung Bagian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985/1986), h, 52.

karena itu, memisahkan masyarakat Lampung dari kebudayaan mereka adalah "mustahil".

Di sisi lain muncul asumsi bahwa *life is education and education is life,*[3] dalam arti bahwa pendidikan sebagai persoalan hidup dan kehidupan merupakan salah satu unsur penting yang tak bisa diabaikan. Bahkan dapat dikatakan, pendidikan adalah jantung kehidupan, dimana tanpa pendidikan kehidupan akan berjalan di tempat tanpa melakukan perubahan yang berarti. Pendidikan tak lain adalah kesadaran dan penyadaran untuk menjadi lebih dewasa. Dengan begitu, kehidupan berkat pendidikan melaju menuju arah yang lebih sempurna.

Pendidikan budaya dan pendidikan berbasis kebudayaan adalah semacam keniscayaan yang tak bisa dipungkiri. Pentingnya kesadaran kebudayaan harus ditanamkan sedalam mungkin ke dalam jiwa masyarakat, dan tentunya melalui jalur pendidikan. Di titik inilah, pendidikan berbasis kebudayaan adalah alat paling ampuh dalam rangka menanamkan kesadaran berbudaya dengan karakter jadi diri sesungguhnya dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) agar masyarakat tidak tercerabut dari akarnya.

Diskursus pendidikan, terutama yang berorientasi menanamkan nilai-nilai budaya, memiliki landasan argumentatif yang cukup kuat untuk terus didemonstrasikan. Setidaknya ada dua alasan penting yang dapat diidentifikasi sehingga pendidikan tetap *up to date* untuk dikaji. *Pertama,* kebutuhan akan pendidikan memang pada hakikatnya krusial karena bertautan langsung dengan ranah hidup dan kehidupan manusia. Membincangkan pendidikan berarti berbicara kebutuhan primer manusia. Sebaliknya, menghindari wacana pendidikan budaya sama halnya dengan menghancurkan jati diri dan identitas. Dampak buruk menjauhkan manusia dari pendidikan budayanya sangatlah muda diterka, semisal terombang-ambingnya generasi muda karena kehilangan identitas budaya dan tergulung oleh arus informasi di era globalisasi yang menghapus jatidiri dan menghantarkan pada absurditas.

---

[3] Dede Mahfudh dan Dayat, "Pentingnya Manajmenen dalam Pengelolaan Pendidikan", *Makalah,* Bogor: Universitas Ibnu Khaldun, 2009, h. 1.

Dalam konteks ini, generasi tua warga Lampung tidak akan rela apabila generasi mudanya terasing dari kebudayaannya sendiri, hanyut dalam arus besar absurditas era globalisasi, dan kehilangan jati diri. Padahal sampai detik ini, masyarakat Lampung masih dikenal sebagai masyarakat yang kuat berpegang teguh pada tradisi dan nilai-nilai adat.[4]

*Kedua,* pendidikan berbasis budaya juga merupakan wahana strategis bagi upaya perbaikan mutu kehidupan manusia, yang ditandai dengan meningkatnya level kesejahteraan, menurunnya derajat kemiskinan dan terbukanya berbagai alternatif opsi dan peluang mengaktualisasikan diri di masa depan. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa masyarakat yang sadar budaya akan bertransformasi menjadi masyarakat yang maju dan beradab. Berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai budaya Lampung berpotensi besar mendatangkan profit materil apabila dijaga dan dikembangkan dengan baik, salah satunya lewat pengembangan kepariwisataan dan lain semacamnya.[5] Ini adalah pertanda bahwa nilai-nilai kebudayaan yang berhasil tertanam dengan baik dalam jiwa masyarakatnya akan membuah hasil yang menjanjikan. Karenanya, pendidikan yang berperan besar dalam rangka menanamkan kesadaran budaya tersebut ikut menempati posisi penting pula.

Dalam tataran nilai, pendidikan secara dan pendidikan berbasis budaya pada khususnya, mempunyai peran vital sebagai pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih progresivitas pada semua lini kehidupan. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, jiwa-jiwa yang progresif, produktif, dan inovatif akan tumbuh secara bertahap dan pasti. Di sinilah nilai penting lain pendidikan itu sendiri. Di samping itu, pendidikan juga dapat menjadi determinan penting bagi proses transformasi personal maupun sosial. Dan sesungguhnya inilah idealisme pendidikan yang mensyaratkan adanya pemberdayaan.

---

[4] *Ibid*., h. 10.

[5] Selengkapnya bisa ditelusur dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Yukrim Latief, dkk, *Kajian Adat Budaya Lampung Sai Batin dalam Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus* (Lampung: Fakta Press Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan, 2007).

Namun dalam tataran ideal, pergeseran paradigma yang awalnya memandang lembaga pendidikan sebagai lembaga sosial, kini dipandang sebagai suatu lahan bisnis basah yang mengindikasikan perlunya perubahan pengelolaan. Perubahan pengelolaan tersebut harus seirama dengan tuntutan zaman. Situasi, kondisi dan tuntutan pasca *booming*-nya era reformasi membawa konsekuensi kepada pengelola pendidikan untuk melihat kebutuhan kehidupan di masa depan. Maka merupakan hal yang logis ketika pengelola pendidikan mengambil langkah antisipatif untuk mempersiapkan diri bertahan pada zamannya. Mempertahankan diri dengan tetap mengacu pada pembenahan total mutu pendidikan berkaitan erat dengan manajemen pendidikan, hal tersebut adalah sebuah keniscayaan.

Manajemen pendidikan menduduki posisi vital dalam dunia pendidikan. Manajemen dapat diibaratkan sebagai "ruh" yang akan menggerakkan gerak-hidup raga pendidikan. Sukses-gagalnya dunia pendidikan meraih cita-cita dan tujuan sangat ditentukan sejauhmana manajemen dijalankan dengan baik. Kegagalan manajemen sudah dipastikan menyebabkan gagalnya upaya pencapaian tujuan pendidikan.

Lebih jauh, manajemen adalah penggunaan efektif sumber tenaga manusia dan bukan manusia serta bahan-bahan materil lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan itu. Manajemen sebagai suatu proses sosial, meletakkan bobotnya pada interaksi orang-orang, baik orang-orang yang berada di dalam maupun di luar lembaga-lembaga formal, atau yang berada di atas maupun di bawah posisi operasional seseorang. Selain itu juga manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks.

Kompleksitas diskursus manajemen pendidikan dilatarbelakangi oleh keniscayaan akan adanya basis filosofis yang kuat untuk melandasinya. Manajemen tanpa landasan filosofis yang kuat dan tidak ditopang oleh nilai-nilai budaya

dapat berakhir pada keausan, seperti mesin yang bekerja secara mekanistik dan suatu saat akan rusak. Sebaliknya, manajemen dengan landasan filosofis yang kuat akan bertahan lebih lama dan dapat diperbaharui setiap saat. Kebutuhan akan landasan filosofis itulah yang menyebabkan diskursus manajemen pendidikan lebih rumit dan tidak sekedar persoalan teknis semata.

Selanjutnya, lembaga pendidikan dapat dipahami tempat bagi penyelenggaran manajemen yang akuntabel. Lembaga pendidikan itu sendiri merupakan suatu pranata sosial. Predikat sebagai pranata sosial ini disimpulkan dari kenyataan bahwa lembaga pendidikan merupakan tempat yang dihuni orang-orang dari berbagai latar belakang sosial, yang kemudian membentuk suatu kesatuan dengan nilai-nilai dan budaya tertentu. Di lembaga pendidikan inilah berbagai nilai bertemu, bersatu, bekerjasama dalam mewujudkan visi-misi bersama. Nilai-nilai dan budaya yang beragama itulah sangat potensial untuk mendukung suksesi dan penyelenggaraan manajemen lembaga pendidikan yang akuntabel. Tetapi, pada saat bersamaan dapat menjadi penghambat.

Dalam konteks ini, kita melihat adanya infiltrasi kekuatan nilai-nilai budaya dalam mempengaruhi jalannya manajemen pendidikan. Nilai-nilai budaya yang berdiam dalam jiwa-batin masyarakat secara hampir kasat-mata berpengaruh besar terhadap sukses tidaknya sebuah pelaksanaan manajemen. Dengan kenyataan ini tidak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa manajemen pendidikan pun memiliki landasan epistimologis untuk mendasarkan dirinya pada nilai-nilai budaya. Dengan kata lain, inilah apa yang disebut dengan manajemen berbasis budaya (*culture-based management*).

Tidak heran apabila sebuah ilustrasi perusahaan dimunculkan oleh Stephen Robins. Ia menyatakan: "Keragaman latar belakang kultur pada tenaga kerja tidak bisa dipungkuri, ia berdampak secara serius pada praktik manajemen. Karenanya para manejer dituntut untuk bisa mengubah filosofi mereka dari memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama menjadi mengenali perbedaan masing-masing, sebagai suatu kekayaan dan menyikapi mereka yang berbeda dengan cara-cara yang menjamin kesetiaan karyawan dan peningkatan produktifitas. Sementara,

pada saat yang sama, tidak melakukan diskriminasi."[6] Apa yang dikemukakan Robins ini jelas berangkat dari asumsi pada suatu keniscayaan adanya multikultural di di tengah masyariakat, juga nilai dan budaya dari setiap kelompok atau anggota organisasi.

Maka jelas dari pernyataan Stephen Robins di atas itu kita menemukan adanya nilai-nilai khas masyarakat yang dapat mendukung terselenggaanya nilai-nilai pendidikan dengan arif, tepat sasaran dan tidak tercerabut dari kebudayaan lokal. Dalam konteks ini, maka terselenggaranya manajemen pendidikan dengan baik dibutuhkan peran pemimpin yang 'melek' budala lokal atau sadar adanya multikultural di tengah-tengah masyarakat sebagai aset yang sangat berguna untuk kepentingan dan cita-cita pendidikan, yaitu mencerdaskan anak bangsa yang sadar akan jati-dirinya..

Untuk konteks peran pemimpin, budaya Lampung memiliki cukup modal untuk itu. Nilai-nilai kebudayaan lokal mengajarkan seperangkat etika dan prinsip hidup yang sangat kuat. Nilai-nilai tersebut, menurut hemat penulis, cukup kuat untuk dijadikan pijakan bagi terwujudnya manajemen pendidikan berbasis budaya. Dengan demikian, mengangkat tema manajemen pendidikan berbasis budaya lokal (Lampung) bukan wacana yang berangkat dari ruang kosong, melainkan dari realitas nyata yang menunggu diterapkan.

Tulisan ini akan lebih fokus mengurai pada nilai manajemen pendidikan yang berbasis budaya sebagai sebuah keniscayaan baik secara normatif, filosofis, maupun sebagai respon terhadap tuntutan zaman yang telah berubah. Berikutnya, pembahasan akan mengarah pada falsafah dan prinsip hidup masyarakat Lampung yang berpotensi besar dijadikan modal dasar bagi terselenggaranya pendidikan yang berbasis budaya lokal ini. Terakhir, kenyataan bahwa adanya "demokrasi" *ala* adat Lampung menjadi faktor pendukung bagi realisasi model manajemen pendidikan yang berbasis budaya lokal.

Dari uraian di atas, setidaknya dapat diketahui bahwa objek material dalam penelitian kualitatif-filosofis ini adalah budaya lokal

---

[6]Stephen Stolp, "Leadership for School Culture", *ERIC Digest*, No. 91. Tahun 1994, h 14.

Lampung. Sedangkan, objek formal penelitan adalah manajemen pendidikan berbasis budaya Lampung. Beberapa permasalahan pokok yang hendak diangkat dalam penelitian ini, yaitu: (1) apakah manajemen pendidikan berbasis budaya ini memiliki asas normatif dan filosofis?, (2) apakah model manajemen pendidikan tersebut merupakan sebuah keniscayaan?, (3) apakah nilai-nilai kebudayaan lokal Lampung memberikan asas kultural yang cukup bagi terselenggaranya manajemen pendidikan berbasis budaya lokal ini?, dan (4) apakah manajemen berbasis budaya lokal ini sebuah cerminan dari manajemen yang demokratis, di dalam suatu negara yang demokratis pula?

Untuk menjawab berbagai persoalan di atas, penelitian kualitatif-filosofis ini akan mencoba memahami hakikat permasalahan manajemen pendidikan yang berbasis budaya. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang bisa menjelaskan dan mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan sebuah rumusan teoritis dan bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini dapat pula digunakan untuk meneliti suatu objek baik berupa nilai-nilai budaya, sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai etika, nilai karya seni, sekelompok manusia, peristiwa atau objek budaya lainnya.[7]

Metode yang sesuai untuk menjelaskan permasalahan penelitian ini adalah metode fenomenologi. Fenomenologi dapat menganalisis berlangsungnya pengalaman komunal, menentukan syarat-syarat dan kaidah-kaidah bagi koherensi dan keutuhan macam-macam jenis pengalaman. Pendekatan Fenomenologis ini sangat relevan digunakan dalam mengkaji suatu budaya sebagai asas atau landasan mengenai cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi satu kesatuan yang padu.

Untuk menganalisis data digunakanlah metode interpretasi dan hermeneutika. Kedua metode ini sangatlah bermanfaat untuk menunjukkan arti, mengungkapkan esensi makna filosofis yang terkandung dalam data secara objektif. Dalam prosesnya, data

[7]A. Fauzie Nurdin, "Integralisme Islam dan Nilai-nilai Filosofis Budaya Lokal pada Pembangunan Propinsi Lampung," *UNISIA,* Vol. XXXII, No. 71, Juni 2009, h. 83.

yang terutama berupa teks ditafsiri sehingga esensi makna dapat ditangkap dan dipahami sesuai konteks kekinian.

## B. Basis Manajemen Pendidikan Berbasis Budaya Lokal

Manajemen pendidikan berbasis budaya lokal (Lampung) merupakan sebuah keniscayaan. Sifatnya yang niscaya tersebut adalah manifestasi dari tuntutan zaman dan kesadaran rasional. Diskursus pentingnya manajemen pendidikan yang berbasis budaya lokal, budaya Lampung khususnya, tidak dapat dipahami sebagai tindakan untuk menajamkan perbedaan yang berpijak pada etnosentrisme. Manajemen pendidikan berbasis budaya lokal ini harus dipahami dalam konteks pengamalan amanat Undang-undang, sekaligus upaya kontekstuaisasi dunia pendidikan dengan tuntutan zaman yang telah berubah.

Undang-Undang Pendidikan Nasional menyuratkan tentang pendidikan berbasis masyarakat (*Community Based Education*)[8] yang didalamnya disebutkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah: Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Lebih lanjut dalam Bagian Kedua Pasal 55 tentang pendidikan berbasis masyarakat diuraikan: (1) Masyarakat berhak meneyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. (2) Penyelenggara pendididkan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Paerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan

[8]Soedijarto, *Pendidikan Nasional sebagai wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa* (Jakarta, CINAPS, 2000), h. 77.

merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Undang-undang di atas mengamanatkan bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai kekhasan masing-masing. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan berbasis budaya lokal (Lampung) adalah sarana untuk mewujudkan pendidikan berbasis budaya itu sendiri. Ini adalah landasan normatif bahwa penyelenggarakan pendidikan dan manajemennya yang berbasis budaya tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang.

Di samping itu, munculnya gaya manajemen yang berbasis budaya ini juga merupakan tuntutan zaman yang telah berubah. Kita semua tahu bahwa pada umumnya pendidikan merupakan cerminan dari kondisi sebuah negara dan kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa. Dengan melihat kekuatan sosial-politik yang sedang berlaku, kita dapat pula memprediksikan bentuk pendidikannya. Sebab, pendidikan dengan sendirinya merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada.[9] Demikian halnya dengan pendidikan yang berbasis budaya ini, tak lain adalah cerminan era kontemporer dan kekuatan kuasa yang sedang berjaya. Karenanya, wilayah pendidikan tidak bisa dilepas dari warna politik.

Mengingat bahwa dunia pendidikan ini masih memiliki relasi kuasa yang bersifat politis, maka masalah pendidikan akan semakin tampak politis tatkala pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Michael W. Apple sebagaimana dikutip H.A.R. Tilaar[10] mengatakan bahwa kurikulum pendidikan yang berlaku tak lain adalah sarana indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Melalui kurikulum, pemerintah telah menjadikan pendidikan sebagai sarana rekayasa dalam rangka mengekalkan struktur kekuasaannya.

Di lain kesempatan, Paulo Freire[11] juga sempat menyinggung

---

[9]Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 77.

[10]H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural* (Magelang: Indonesiatera, 2003), h. 94-94.

[11]Paulo Freire, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 195.

bahwa sekolah berperan sebagai alat kontrol sosial yang efesien bagi upaya menjaga status qua. Di negara-negara otoriter yang menganut paham pemerintahan totalitarianisme, pemerintah dapat membatasi kebebasan individu dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan yang uniform bagi semua peserta didik. Bagi negara otoriter semacam ini, pendidikan menampilkan kekuatan politiknya dalam mendominasi rakyat. Pemerintah dapat secara mutlak mengatur pendidikan, sebab tujuan pendidikan baginya adalah membuat rakyat menjadi alat negara.[12]

Zaman telah berubah. Pemerintahan yang otoriter ditolak oleh segenap manusia yang menyadari betapa pentingnya kebebasan berpikir dan berekspresi. Dimana-mana, pemerintahan yang otoriter selalu tumbang di tangan rakyat, sehingga rakyatlah yang memegang kendali kuasa. Kekuasaan rakyat dalam wilayah politik semacam itu juga ikut berperan dalam mengubah wajah pendidikan. Dunia pendidikan lebih pro-rakyat. Alhasil, wacana pendidikan berbasis rakyat (masyarakat) lahir ke dunia. Termasuk pendidikan berbasis budaya lokal ini adalah bentuk sebuah penghargaan atas eksistensi masyarakat yang hidup dengan budaya masing-masing yang beragam.

Ketika sebuah negara menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis, maka dunia pendidikan di negara tersebut juga bersifat demokratis. Inilah alasan untuk mengatakan bahwa pendidikan berbasis budaya lokal adalah tuntutan dari zaman yang telah berubah. Hadirnya pendidikan berbasis budaya adalah sebuah keniscayaan dalam satu negara yang demokratis.

Demokratisasi bidang pendidikan merupakan suatu keharusan. Dengan pendidikan yang demokratis inilah manusia-manusia yang berwatak demokratis pula akan lahir. Dengan kata lain, penyelenggaraan pendidikan yang berbasis budaya dapat menanamkan kesadaran akan keragaman, pluralitas budaya, keharusan toleransi, dan menghargai perbedaan. Dengan pengibaratan yang lain dapat dikatakan bahwa pendidikan yang berbasis budaya adalah pendidikan sejati yang telah memenuhi pilar-pilar utamanya. Dalam sebuah laporan yang dikirim ke

[12]Kartini Kartono, *Tinjauan Politik*, h. 78.

UNESCO, Jacques Delors, et. al.,[13] mengemukkan bahwa ada empat buat sendi/pilar pendidikan, yaitu: (a) *learning to know* (belajar untuk mengetahui), (b) *learning to do* (belajar untuk berbuat), (c) *learning to live togather*, *learning to live with others* (belajar untuk hidup bersama), dan (d) *learning to be* ( belajar untuk menjadi seseorang)

Sekali lagi inilah alasan bahwa pendidikan yang berbasis budaya lokal bukan dalam rangka menajamkan perbedaan di tengah-tengah kehidupan bangsa yang majemuk, melainkan sebagai upaya untuk menyadari keragaman dan menghargai perbedaan. Sehingga lahirlah jiwa-jiwa yang kuat secara budaya dan tegas secara identitas.

Selanjutnya, pendidikan berbasis budaya ini adalah wujud dari hasil reformasi. Reformasi pendidikan melalui demokrasi pendidikan, menurut Zamroni[14], dapat dilakukan dalam tiga aspek pendidikan, yaitu regulatori, profesionalitas, dan manajemen.

Aspek regulatori dititikberatkan pada reformasi kurikulum yang berkaitan dengan perumusan tujuan pendidikan, penerapan kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*), pergeseran paradigma kerja guru dari *responsibility* ke arah *accountability* dan pelaksanaan evaluasi dengan Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat esei dan porto folio.

Aspek profesionalitas ditujukan untuk mengembalikan hak-hak dan wewenang kepada guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya. Aspek ini dapat ditempuh melalui pengembangan kesadaran hak-hak politik guru dan pemberian kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya.

Sedangkan aspek manajemen pendidikan ditujukan untuk mengubah pusat-pusat pengambilan dan kendali pendidikan. Reformasi aspek manajemen ini dapat dilakukan dengan dua cara. ***Pertama***, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada lembaga pendidikan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pendidikan. Bentuk kebijakan ini adalah menumbuhkan

---

[13]Jacques Delors, et.al., *Learning: The Treasure Within Report to UNESCO of the International Commissions on Education for the Twenty-fisrt Century* (France: UNESCO Publishing, 1996), h. 85-97.

[14]Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society* (Yogyakarta: Bigraf, t.t.), h. 127-130.

manajemen berbasis sekolah (*school-based management*). ***Kedua***, memberikan kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*).

Masalah pendidikan berbasis masyarakat adalah wacana baru bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang telah dipaparkan di muka, yakni dunia pendidikan berkorelasi intens dengan dunia politik, maka di sini dipahami bahwa pendidikan berbasis masyarakat juga berkaitan dengan reformasi pendidikan yang menghendaki adanya pergeseran paradigma pendidikan dari sentralistik ke desentralistik, bergeser dari praktik pendidikan yang otoriter ke praktik pendidikan demokratis yang membebaskan, serta dari konsep pendidikan yang berorientasi pemerintah (*state oriented*) ke konsep pendidikan yang berorientasi masyarakat (*community oriented*). Perubahan fundamental di dunia politik meniscayakan terjadinya perubahan pula di bidang pendidikan.

## C. Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya Lampung dalam Praksis Pendidikan

Lokalitas budaya Lampung mengandung spirit demokrasi yang unik dan khas. Kita tahu bahwa secara garis besar suku bangsa Lamung dapat dibedakan menjadi dua kelompok masyarakat, yakni masyarakat Lampung yang beradat Pepaduan dan masyarakat Lampung yang beradat Peminggir atau Lampung Sai Batin. Kedua kelompok masyarakat ini memiliki ada-istiadat yang khas sesuai dengan tradisi masing-masing, namun secara mendasar kedua kelompok masyarakat tersebut memiliki persamaan unsur budaya tertentu.[15]

Perbedaan adat yang agak mencolok antara kedua masyarakat tersebut adalah dalam hal pengangkatan seorang pemimpin adat. Masyarakat Lampung yang beradat Sai Batin, seseorang diangkat sebagai pemimpin adat berdasarkan hak waris yang diperolehnya secara turun-temurun. Sedangkan dalam adat masyarakat Lampung yang beradat Pepadun, setiap orang berhak

[15]*Ibid*. h. 6-9.

menjadi pemimpin adat dengan syarat membayar kewajiban-kewajiban tertentu.

Secara sepintas memang terkesan adanya bentuk monarkhi yang dipertentangkan dengan sistem demokrasi. Namun, pada titik yang lebih substil kedua adat tersebut tidaklah bertentangan satu sama lain. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat Lampung Sai Batin terdapat filosofi hidup, yaitu satu hati antar sesama masyarakat.[16] Sekalipun *Sultan* atau *Suttan* diangkat secara turun-tumerun, namun Sultan tetaplah mewakili seluruh suara rakyat. Inilah hakikat spirit demokrasi *ala* adat Lampung.

Spirit demokrasi ini adalah nilai luhur budaya lokal yang dapat menjadi basis filosofis-kultural dalam rangka menyelenggarakan manajemen pendidikan berbasis budaya. Tanpa adanya suasana politis yang demokratis maka pendidikan berbasis budaya lokal tidak akan pernah terwujud. Sebaliknya, nuansa sentralistik akan menggantikannya sebagai perwujudan dari negara yang bermadzhab totaliterianisme.

Manajemen pendidikan berbasis budaya adalah cerminan dari manajemen yang demokratis. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Demokrasi dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan puncak di tangan rakyat. Rakyat (masyarakat) dapat menentukan arah masa depannya sendiri, tanpa intervensi dari penguasa. Pendidikan berbasis budaya Lampung adalah cerminan dari pilihan bebas masyarakat Lampung sendiri. Demikian pula, mengarahkan pendidikan ke tujuan berupa mencetak *output* pendidikan yang teguh memegang nilai-nilai luhur budaya adalah pilihan bebas. Di sinilah spirit demokrasi itu tumbuh.

Masykuri Abdillah pernah mengatakan bahwa demokrasi pada dasarnya memiliki tiga unsur yang paling utama, yaitu: adanya kemauan politik dari negara (*state*), adanya komitmen yang kuat dari masyarakat politik (*political society*) dan adanya *civil society* yang kuat dan mandiri. Ketiga unsur demokrasi ini tumbuh dalam lingkungan sebuah negara yang dapat menjamin kekuasaan mayoritas, suara rakyat dan pemilihan umum yang

[16]*Ibid.* h. 13.

bebas dan bertanggung jawab.[17]

Dalam konteks demokrasi, kedaulatan rakyat berada di puncak tertinggi. Di samping itu, demokrasi memiliki dua norma baku, yaitu *public accountability* (pertanggungjawaban kepada rakyat) dan *contestability* (uji kesahihan apakah demokrasi itu bercermin kepada kehendak bersama atau atas nama kepentingan lain)[18].

Ada satu nilai budaya Lampung yang terkesan sederhana namun menyimpan makna filosofis yang dalam, yakni seorang pemimpin adat tidak boleh kencing berdiri.[19] Ini adalah simbol bahwa seorang pemimpin bertanggungjawab atas tindakannya di hadapan moralitas dan etika yang dianut masyarakatnya (rakyat). Nilai *public accountability* di sini sangatlah kental. Dalam hal sederhana saja seorang pemimpin adat harus menjaga etika apabila dalam mengemban kepercayaan dan amanat rakyatnya yang tentu jauh lebih besar.

Pendidikan merupakan sarana paling strategis bagi upaya demokratisasi. Azyumardi Azra[20] mengatakan bahwa cara paling strategis untuk "mengalami demokrasi" (*experiencing democracy*) adalah melalui apa yang disebut sebagai *democracy education* (pendidikan demokrasi).

Pendidikan demokrasi (*democracy education*) dapat dipahami sebagai sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Dunia pendidikan menjadi sarana bagi demokrasi. Selanjutnya Azra menegaskan bahwa dalam banyak hal pendidikan demokrasi identik dengan "pendidikan kewargaan" (*civic education*), meskipun pendidikan kewargaan lebih luas cakupannya daripada pendidikan demokrasi.

Sejalan dengan pendapat Azyumardi Azra di atas, Syafi'i

---

[17]Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, h. 73.

[18]Soetjipto Wirosardjono, "Demokrasi" dalam Frans Magnis-Suseno dkk., *Dari Seminar Sehari Agama dan Demokrasi*, cet. ke-2 (Jakarta: P3M-FNS, 1994), h. 14-15.

[19] Yukrim Latief, dkk, *Kajian Adat Budaya Lampung,* h. 98

[20]Azyumardi Azra, "Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi" dalam *SKH Kompas*, 14 Maret 2001.

Ma'arif[21] juga mengemukakan pendapatnya bahwa proses penciptaan mentalitas dan kultur demokrasi dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Mewujudkan sistem pendidikan yang demokratis merupakan keniscayaan yang harus disikapi secara positif oleh seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan.

Demokrasi pendidikan lebih bersifat politis, menyangkut kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di tingkat nasional. Apabila demokrasi mulai diterapkan dalam pendidikan, maka pendidikan tidak akan menjadi alat penguasa. Rakyat atau masyarakat diberikan haknya secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan nasional. Semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan diharapkan dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan. Inilah yang disebut demokrasi pendidikan menurut Kartono.[22]

Adapun pendidikan demokrasi berkaitan dengan bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan di tingkat lokal[23]. Di dalam pendidikan demokrasi, proses pembelajaran di kelas dapat diarahkan pada pembaharuan kultur dan norma keadaban. Fungsi pendidik dalam proses pembelajaran yang demokratis adalah sebagai fasilitator, dinamisator, mediator, dan motivator.

Sebagai fasilitator, pendidik harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba menemukan sendiri makna informasi yang diterimanya. Sementara sebagai dinamisator, pendidik harus berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang dialogis dan berorientasi pada proses. Sedangkan sebagai mediator, pendidik harus memberikan rambu-rambu atau arahan agar peserta didik bebas belajar. Sebagai motivator, pendidik harus selalu memberikan dorongan agar peserta didiknya bersemangat dalam menuntut ilmu.

Semua inti dari spirit demokrasi pendidikan dan pendidikan demokrasi di atas harus difasilitasi dengan adanya manajemen

---

[21]Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi,* h. viii-ix.

[22]Kartini Kartono, *Tinjauan Politik,* h. 196-197

[23] Husaini Usman, "Menuju Masyarakat Madani Melalui Demokratisasi Pendidikan" http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/28/menuju_masyarakat_madani_melalui.htm. (Diakses tanggal 17 Maret 2012).

pendidikan yang sesuai, yaitu pendidikan yang berbasis demokrasi pula. Manajemen yang lebih demokratis adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan cita-cita yang demokratis pula. Sementara itu, manajemen yang demokratis dapat mewujud secara konkrit dalam wajah manajemen berbasis budaya. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, demokratisasi pendidikan di antaranya dapat diwujudkan melalui penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat dan budaya. Konsep ini menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengambilan kebijakan-kebijakan pendidikan. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang baru.[24] Telah banyak yayasan-yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan bahkan oleh perseorangan melibatkan masyarakat dengan menggali nilai-nilai lokalitas dengan menyelenggarakan pendidikan.

Sejarah bangsa ini membuktikan bahwa di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, partisipasi masyarakat dalam rangka pendidikan berbasis budaya telah dilaksanakan lebih lama lagi, yaitu setua sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara. Hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari rangkang, dayah, meunasah (Aceh), surau (Minangkabau), pesantren (Jawa), Bustanul Athfal, Madrasah Diniyah dan sekolah-sekolah Islam lainnya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat Muslim. Lembaga-lembaga pendidikan ini hanya sekedar contoh kecil saja sekaligus sebagai saksi sejarah bahwa manajemen pendidikan yang berbasis masyarakat dan lokalitas budaya pernah diterapkan oleh bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya.[25]

Kini, masyarakat Lampung sendiri, sebagai bagian dari suku bangsa Indonesia, memiliki kesempatan yang sama, dan menyerap

---

[24]Suyata, *Community Participation in School Development: Acces, Demand, and School Construction* (Jakarta: Directorate of Seconday Education, Directorate General of Primay and Secondary Education, Ministry of Education and Culture, 1996), h. 2

[25]Azyumardi Azra, "Masalah dan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah" *Makalah* pada Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan di Hotel Indonesia, Jakarta 8-10 Agustus 2002, kerjasama Universitas Negeri Jakarta dengan Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia. h. 5-6.

"ruh sejarah" yang sama, yakni dengan menerapkan pendidikan berbasis budaya dan merealisasikannya melalui manajemen pendidikan yang dijiwai oleh spirit lokalitas Lampung.

## D. Manajemen Pendidikan Berbasis Nilai-nilai Budaya Lokal Lampung

Pada uraian di muka kita panjang lebar membahas basis normatif, filosofis, dan urgensitas manajemen pendidikan dan pendidikan berbasis budaya lokal (Lampung). Selanjutnya, apakah nilai-nilai budaya Lampung itu sendiri mencukupi syarat sebagai modal dasar bagi terselenggaranya manajemen pendidikan berbasis budaya merupakan hal penting lain. Jawabannya dapat dilihat dari nilai-nilai budaya Lampung, terlebih yang dapat diinterpretasikan sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya praktek manajemen yang baik (*good management practice*).

Achmad Munib[26] menyatakan bahwa manajemen pendidikan yang ditangani secara rapi sesuai prinsip-prinsip manajemen yang benar berbasis kemasyarakatan sangatlah dibutuhkan. Hal itu lantaran lembaga pendidikan formal masih dinilai lamban dalam merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu, terkait dengan kesejahteraan. Achmad Munib menganjurkan agar dunia pendidikan membuka diri dalam merespon perubahan di antaranya dengan memodernisasi manajemen pengelolaannya. Modernisasi di sini adalah pelimpahan tanggungjawab kepada kehendak masyarakat sehingga pendidikan jauh dari sifat yang sentralistik.

Kamisa memberikan gambaran tentang arti manajemen. Dalam konteks ini, manajemen yang dimaksud adalah proses perencanaan dan pembuatan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian keuangan, fisik, dan sumber informasi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.[27] Efektif dan efisien dimaksudkan ketepatan cara, usaha, kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu,

---

[26]Achmad Munib, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Semarang: Unnes Press, 2011), h. 106.

[27]Kamisa, *Kamus Lengakap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997), h. 49.

tenaga, biaya, berdaya-guna, dan tepat-guna.

Tampaknya, nilai-nilai budaya Lampung mencukupi syarat untuk memuwujudkan manajemen yang efektif-efisien tersebut. Masyarakat Lampung, dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan, menganut falsafah hidup yang tercermin dalam bahasa daerah yang disebut *Pi'il Pasenggiri*.[28] Dalam dokumen atau literatur resmi budaya Lampung dikatakan bahwa Pi'il Pasenggiri dipahami sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku dan sikap hidup yang harus menjaga dan menggerakkan nama baik, martabat secara pribadi maupun kelompok.

Secara universal, *Pi'il Pasenggiri* mengandung makna berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa harga diri, ramah dan suka bergaul, tolong menelong dan bernama/bergelar besar. Sebagai prinsip hidup dalam masyarakat, Pi'il Pasenggiri didukung oleh unsur-unsur seperti *Sakai Sambayan* (tolong menolong di antara sesama silih berganti), *Nemui Nyimah* (selalu membuka diri untuk menerima tamu, dan keinginan untuk memberi secara ikhlas sebagai tanda akrab), *Nengah Nyapur* (suka berkenalan dengan siapapun karena pandai bergaul), dan *Bajuluk Beadak* (menjaga wibawa agar tidak mendapat penilaian buruk dari masyarakat sekitarnya).[29]

Falsafat dan prinsip hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat berbudaya Lampung tersebut adalah modal dasar bagi terciptanya *good management practice.* Nilai-nilai dasar kebudayaan tersebut dipastikan mampu menciptakan manajemen pendidikan yang ideal, sehingga tujuan pendidikan pun tercapai secara optimal dan maksimal. Manajemen pendidikan dapat didesign dan dirancang sedemikian rupa selaras ajaran luhur masyarakat Lampung tersebut.

Zubaedi[30] menyatakan bahwa desain manajemen pendidikan berbasis masyarakat meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengembangan yang terus-menerus melalui *budgeting* dan evaluasi.

---

[28]Yukrim Latief, dkk, *Kajian Adat Budaya Lampung,* h. 101.

[29]*Ibid*., h. 102-103.

[30]Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 156.

1. **Perencanaan *(planning)***

Hampir mayoritas pakar budaya dan sosial mengamini bahwa abad milenium ini mengikis habis nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Era ilmu pengetahuan yang positifitik membawa manusia ke kehidupan yang gersang spiritualitas dan nilai-nilai budaya. Karenanya, manusia semakin terasing dari dirinya sendiri. Generasi muda penerus bangsa sudah tidak lagi mendapatkan pendidikan karakter dalam bangku pendidikan, misal pengajaran tentang akhlak, tata krama, sopan santun dan budaya.

Solusi alternatif yang bisa diajukan adalah memperkenalkan konsep pendidikan berbasis budaya yang lebih mengedepankan nilai-nilai moral kemasyarakatan guna membangun karakter peserta didik. Pendidikan tidak hanya diorientasikan untuk mencetak manusia-manusia pandai secara intelektual melainkan juga memiliki kepekaan emosional dan spiritual.

Dalam konteks *planning* ini, manajemen pendidikan yang berbasis pada kebudayaan harus diarahkan untuk menciptakan manusia-manusia yang bermartabat, yang mampu memegang teguh falsafat hidup budaya Lampung, yang mengkristal dalam *Pi'il Pasenggiri.* Pendidikan harus dirancang sedemikian rupa supaya generasi-generasi muda Lampung dapat menanamkan nilai-nilai budaya mereka ke dalam ceruk sanubari yang terdalam. Oknum-oknum yang mengelolah dunia pendidikan harus bergerak bersama dan bekerjasama dengan seluruh *stakeholder*-nya dalam rangka mencetak anak didik yang berpegang teguh pada nilai-nilai luhur budaya Lampung.

2. **Pengorganisasian *(Organizing)***

Setelah menetapkan *planning,* manajemen berurusan dengan persoalan pengorganisasian. Zubaedi[31] menyatakan bahwa pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap pengorganisasian ini, merupakan pengaturan dan pembagian tugas-tugas pada seluruh pengurus atau pengelola lembaga pendidikan untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai

[31]*Ibid.*, h . 158.

tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuannya dirangkai dalam Visi dan Misi pendidikan berbasis budaya Lampung semisal visinya adalah Mencetak generasi juara yang kompetitif, deduktif dan berakhlak mulia. Generasi juara tersebut dimaksudkan pada tatanan *mind set* yaitu terciptanya generasi yang tangguh, pantang menyerah, berani mencoba, optimis, sportif, jujur, dan tak kenal putus asa yang memiliki jiwa kompetitif (daya saing yang berkualitas) deduktif (sikap deduksi) dan beakhlak mulia (bermoral, beradab dan berbudaya).

Sedangkan misi yang ditempuh adalah menyelenggarakan konsep pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: *"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab".*

### 3. Pengendalian *(Controlling)*

Kembali pada dasar pendidikan berbasis masyarakat (baca: budaya lokal) yaitu pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, maka dalam proses penyelenggaraan pendidikan pengendalian dilakukan secara bersama-sama antara pengurus, pengelola dan masyarakat. Semua elemen bertanggungjawab untuk mengkontrol berjalannya pendidikan. Kontrol bersama ini adalah bukti keseriusan semua pihak, terutama pengelola pendidikan, dalam rangka mencetak insan yang berbudaya.

Pada tataran implementasi pendidikan berbasis budaya ini, masyarakat harus berpartisipasi melakukan pengendalian dan pengawasan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pendayagunaan dan pengelolaan pendidikan. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam ruangan kelas yang sempit melainkan di setiap ruang dan waktu. Pengawasan yang dilakukan bersama menciptakan kehidupan betul-betul

sepenuhnya menjadi ajang pendidikan, dan setiap detik waktu adalah masa-masa menempuh pendidikan. Dengan kata lain, pengawasan bersama ini adalah upaya nyata dari prinsip *life is education and education is life.*

### 4. Penganggaran *(Budgeting)*

Setiap organisasi membutuhkan dana untuk membiayai kegiatannya. Begitu halnya dengan organisasi pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Organisasi pendidikan harus mengadakan perencanaan *budget* secara berkala untuk mengalokasi dana yang tersedia, agar dana itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh setiap unit kerja dalam lembaga tersebut.

Menurut Koontz[32] penganggaran *(budgeting)* merupakan satu langkah perencanaan dan juga sebagai instrumen perencanaan yang fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya Koontz membatasi bahwa *budgeting* adalah formulasi perencanaan untuk periode tertentu dibutuhkan sejumlah dana.

Urusan penganggaran ini juga menemukan landasan kulturalnya dalam nilai-nilai budaya Lampung, yakni prinsip *Sakai Sambayan. Sakai* (Sasakai) artinya tolong-menolong di antara sesama secara silih berganti. *Sambayan* (Sesambai) artinya gotong-royong dalam mengerjakan sesuatu yang berat dan besar. Jadi, *Sakai Sambayan* mencakup pengertian yang luas termasuk di dalamnya goton- royong, tolong-menolong, bahu-membahu, dan memberikan apapun yang bermanfaat kepada orang lain, baik berupa materiil, moril, pikiran, dan sebagainya.[33]

Dana pendidikan, dalam konteks ini, dapat ditanggung secara bersama di samping juga mendapat subsidi dari pemerintah sesuai amanat undang-undang. Dengan demikian, *budgeting* adalah bahasa kontemporer yang lebih teknis yang menggantikan prinsip Sakai Sambayan secara reduktif.

---

[32]*Ibid*., h.160.

[33]Yukrim Latief, dkk, *Kajian Adat Budaya Lampung,* h. 102.

**5. Evaluasi *(Evaluation)***

Nilai-nilai budaya Lampung juga mengajarkan untuk selalu mawas diri, mengevaluasi diri, dan menjaga kehormatan diri. Prinsip *Bejuluk Beadok/Buadek* secara harfiah dapat dipahami bahwa seseorang yang memiliki gelar adat dituntut menjadi contoh teladan. Oleh karena itulah, ia harus bersikap dan bertingkah laku sesua dengan nilai norma yang berlaku.[34] Namun secara substantif, Prinsip *Bejuluk Beadok* mengajarkan kita semua untuk pandai-pandai mengkoreksi diri (Arab: *muḥāsabah,* Inggris: *Evaluation*). Orang yang memanggul gelar adat harus selalu mengkoreksi perbuatan dan tindakannya sehari-hari, apakah berada di rel kebenaran atau telah menciderai moralitas dan etika yang diajarkan oleh budaya luhur.

Tujuan yang substansial inilah, yaitu keharusan evaluasi, menemukan relevansinya dalam ranah manajemen pada umumnya, dan manajemen pendidikan pada khsususnya. Evaluasi sebagai fungsi dari administrasi pendidikan merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan ketercapaian program organisasi. Untuk mengukur hasil kesesuaian dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapai tujuan pendidikan berbasis budaya tersebut.

Evaluasi mencakup input, proses dan produk (IPP), penilaian input memfokuskan pada kemampuan sistem dan strategi pencapaian tujuan. Penilaian proses memiliki fokus yaitu pada penyediaan informasi untuk pembuatan keputusan dalam melaksanakan program. Sedangkan penilaian produk berfokus pada mengukur pencapaian proses dan akhir program.

Jika input yang telah menjalani proses kemudian menghasilkan produk yang sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan maka konsep tersebut tetap dan terus dikembangkan. Namun jika tidak sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan maka konsep tersebut harus ditinjau ulang dan proses pembelajaran harus ditingkatkan dengan melihat kualitas sarana dan prasarana baik fisik (kurikulum, gedung, peralatan, bahan

[34] *Ibid.,* h. 103.

kajian, media, metode dan evaluasi) maupun non fisik (kualitas sumber daya guru).

Alhasil, manajemen pendidikan menemukan basis kulturalnya dalam nilai-nilai luhur yang diajarkan nenek-moyang masyarakat Lampung. Manajemen pendidikan berbasis budaya Lampung, dengan begitu, bukan diskursus ilutif-imajinatif melainkan realitas yang menemukan akar budayanya.

## E. Penutup

Masyarakat Lampung baik yang beradat Sain Batin maupun Pepaduan memiliki kebudayaan lokal yang sangat kental, dan berpotensi besar sebagai asas utama bagi terselenggaranya pendidikan yang ideal. Nilai-nilai budaya yang terus dipegang tegus dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung itu, ternya mencukupi sebagai modal dasar dan landasan filosofis bagi terselenggaranya pendidikan yang demokratis. Karenanya, manajemen pendidikan yang berlandaskan lokalitas Lampung merupakan keniscayaan pada zaman kontemporer ini.

Alhasil, manajemen pendidikan yang berbasis pada budaya lokal ini, dengan sendirinya, merupakan manifestasi dari pendidikan yang demokratis dan berbasis masyarakat (*community-based education*). Pendidikan dapat dirancang, diarahkan, dikontrol, dan dievaluasi berdasarkan spirit-spirit luhur lokalitas masyarakat Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Azra, Azyumardi, "Masalah dan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah" *Makalah* pada Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan di Hotel Indonesia, Jakarta 8-10 Agustus 2002, kerjasama Universitas Negeri Jakarta dengan Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia.

Azra, Azyumardi, "Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi", *SKH Kompas*, 14 Maret 2001.

Delors, Jacques, et.al., *Learning: The Treasure Within: Report to UNESCO of the International Commissions on Education for the Twenty-fisrt Century*, France: UNESCO Publishing, 1996.

Freire, Paulo, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Hadikusuma, Hilman, dkk, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, cet. ke-2, Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Propinsi Lampung Bagian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985/1986.

Hadikusuma, Hilman, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Kamisa, *Kamus Lengakap Bahasa Indonesia,* Surabaya: Kartika, 1997.

Kartono, Kartini, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Latief, Yukrim, dkk, *Kajian Adat Budaya Lampung Sai Batin dalam Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Tanggamus,* Lampung: Fakta Press Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan, 2007.

Mahfudh, Dede, dan Dayat, "Pentingnya Manajmenen Dalam Pengelolaan Pendidikan", *Makalah,* Bogor: Universitas Ibnu Khaldun, 2009.

Munib, Achmad, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Semarang: Unnes Press, 2011.

Nurdin, A. Fauzie, "Integralisme Islam dan Nilai-nilai Filosofis Budaya Lokal pada Pembangunan Propinsi Lampung", *UNISIA,* Vol. XXXII, No. 71, Juni 2009.

Soedijarto, *Pendidikan Nasional sebagai wahana Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa*, CINAPS, 2000.

Stolp, Stephen, "Leadership for School Culture", *ERIC Digest*, No. 91. Tahun 1994.

Suyata, *Community Participation in School Development: Acces, Demand, and School Construction*, Jakarta: Directorate of Seconday Education, Directorate General of Primay and Secondary Education, Ministry of Education and Culture, 1996.

Tilaar, H.A.R., *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesiatera, 2003.

Usman, Husaini, "Menuju Masyarakat Madani melalui Demokratisasi Pendidikan", http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/28/menuju_masyarakat_madani_melalui.htm. Diakses tanggal 17 Maret 2012.

Wirosardjono, Soetjipto, "Demokrasi" dalam Frans Magnis-Suseno dkk., *Dari Seminar Sehari Agama dan Demokrasi*, cet. ke-2, Jakarta: P3M-FNS, 1994.

Zamroni, *Pendidikan Untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta: Bigraf, t.t.

Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.